

**RENCANA AKSI KINERJA
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II
TAHUN 2022**

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan Indikator Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II Tahun 2022, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II dalam rangka mewujudkan visi yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II”

Dengan misi:

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan .
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi Badan Peradilan.

Rencana Aksi Kinerja Pengadilan Negeri Muara Teweh Kelas II mencantumkan Program, Kegiatan, target, dan anggaran sebagaimana terlampir.

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II

Sasaran Strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
6. Meningkatkan transparansi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	15 %	30 %	60 %	90 %
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	5 %	5 %	5 %	10 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum	10 %	20 %	40 %	80 %
		- Banding				
		- Kasasi				
		- Peninjauan Kembali				
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	5 %	5 %	10 %	20 %
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %	90 %	90 %	90 %

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang telah di minutas/dikirim kan ke pengadilan pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5 %	5 %	10 %	20 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	5 %	5 %	5 %	10 %
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	5 %	5 %	10 %	20 %
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	10 %	20 %	40 %	80 %
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	80 %	80 %	80 %	80 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi)	5 %	5 %	5 %	10 %
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Jumlah pengawasan keuangan perkara	90 %	90 %	90 %	90 %
		b. Jumlah pengawasan keuangan DIPA	90 %	90 %	90 %	90 %
		c. Jumlah pengawasan bidang administrasi umum	90 %	90 %	90 %	90 %
6.	Meningkatnya transparasi Pengelolaan SDM, keuangan dan Aset	a. Persentase jumlah SDM yang mengikuti pelatihan Teknis dan Administrasi Umum	10 %	20 %	40 %	80 %
		b. Persentase realisasi PNBP	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase realisasi Anggaran Belanja (DIPA)	20 %	40 %	80 %	99 %
		d. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana pengadilan	10 %	40 %	80 %	80 %

No	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendaftaran Berkas Perkara	√	√	√	√	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan Di Tingkat Pertama Dan Banding Yang Tepat Waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Kalimantan Tengah	36.000.000
2	Penetapan Hari Sidang	√	√	√	√				15.000.000
3	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	√	√	√	√				40.400.000
4	Pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√				28.680.000
5	Pengiriman petikan/salinan putusan kepada JPU dan terdakwa	√	√	√	√				12.250.000
6	Minutasi/Upaya hukum	√	√	√	√				4.500.000
7	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				1.200.000
8	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama.	√	√	√	√				750.000

9	Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√	√	Layanan bantuan hukum perseorangan			19.200.000
10	Sidang diluar Gedung pengadilan	√	√	√	√	√				5.000.000
11	Layanan umum	√	√	√	√	√	Dukungan manajemen non operasional sakter daerah	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	5.000.000
12	Layanan perkantoran	√	√	√	√	√	Layanan perkantoran			4.432.112.000
13	Layanan Sarana Internal	√	√	√	√	√	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi			10.000.000

MuaraTeweh, 10 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA TEWEH KELAS II


LEO SUKARNO, S.H.
 NIP. 19791022 200212 1 002